

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 2, Nomor 7, Oktober 2023, Halaman 72-77
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.10005119)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10005119>

Tipe Organisasi dan Manajemen Publik Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

Ignatius Layola¹, Padmono Wibowo²
^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Abstrak

Kepadatan, kurangnya ruang, masalah keamanan, rehabilitasi narapidana, dan pengelolaan sumber daya manusia hanyalah beberapa masalah yang mengganggu lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Lapas Kelas I Malang memiliki kapasitas hunian sebanyak 1.282, sedangkan pada bulan Juni 2021, terdapat narapidana sebanyak 3.366 sehingga mengakibatkan pada kurangnya pemenuhan hak pada narapidana. Oleh karena itu, diperlukan manajemen publik yang kompeten sangat penting untuk memenuhi tantangan ini secara langsung. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi tipe organisasi dan manajemen publik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus Lapas Kelas I Malang sebagai subjek. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa manajemen publik di Lapas adalah kunci untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam sistem pemasyarakatan. Meskipun demikian, banyak hambatan seperti kepadatan, kurangnya sumber daya, kurangnya staf berkompeten, masalah keamanan, ketegangan antara narapidana, ketidakpastian peraturan, dan stigma masyarakat, yang mempengaruhi manajemen organisasi di Lapas Kelas I Malang. Manajemen publik yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, pelayanan publik yang berkualitas, pengelolaan risiko dan keamanan, pengembangan staf, dan akuntabilitas serta transparansi. Oleh karena itu, peran manajemen publik di Lapas Kelas I Malang sangat penting untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang berhasil dan memastikan perlindungan hak asasi manusia narapidana.

Kata kunci : Organisasi, Manajemen Publik, Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

Overcrowding, lack of space, security issues, inmate rehabilitation, and human resource management are just some of the problems plaguing correctional institutions in Indonesia. Malang Class I Prison has a residential capacity of 1,282, while in June 2021, there were 3,366 inmates, resulting in a lack of fulfillment of prisoners' rights. Therefore, the need for competent public management is essential to meet these challenges head-on. The aim of this research is to identify the type of organization and public management at Class I Malang Penitentiary. This research uses qualitative research methods with a case study of Malang Class I Prison as the subject. The research results reveal that public management in prisons is the key to achieving effectiveness, efficiency and accountability in the correctional system. However, there are many obstacles such as overcrowding, lack of resources, lack of competent staff, security problems, tension between inmates, regulatory uncertainty, and community stigma, which affect organizational management in Malang Class I prisons. Good public management can improve operational efficiency, quality public services, risk and security management, staff development, and accountability and transparency. Therefore, the role of public management in Malang Class I Prison is very important to achieve successful correctional goals and ensure the protection of prisoners' human rights.

Keywords : Organizations, Public Management, Correctional Institutions

Article Info

Received date: 15 Sept. 2023

Revised date: 25 Sept. 2023

Accepted date: 13 Okt. 2023

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kewajiban internasional di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia sebagai akibat dari keanggotaannya di PBB (Indriyatmoko, A., 2020). Manajemen publik yang baik dari lembaga pemasyarakatan diperlukan untuk memenuhi kriteria internasional ini. Salah satu tujuan Indonesia dalam proses reformasi yang sedang berjalan adalah untuk meningkatkan sistem pemasyarakatan negara. Perlindungan hak asasi manusia, keamanan, pemulihan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat adalah bagian dari ini. Memperbaiki kondisi di Lapas bergantung pada administrasi publik yang kompeten. Kepadatan, kurangnya ruang, masalah keamanan, rehabilitasi narapidana, dan pengelolaan sumber daya manusia hanyalah beberapa masalah yang mengganggu lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Pradhana, F. A., & Wibowo, P., 2020).

Lapas Kelas I Malang memiliki kapasitas hunian sebanyak 1.282, sedangkan pada bulan Juni 2021, terdapat narapidana sebanyak 3.366 sehingga mengakibatkan pada kurangnya pemenuhan hak pada narapidana (Times Indonesia.co.id, 2021). Oleh karena itu, diperlukan manajemen publik yang kompeten sangat penting untuk memenuhi tantangan ini secara langsung. Lapas Kelas I Malang menjadi contoh kasus yang menggambarkan permasalahan ini dengan jelas. Kapasitas hunian yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah narapidana saat ini menciptakan ketidakproporsionalan yang signifikan, yang dapat mengakibatkan kurangnya pemenuhan hak-hak narapidana.

Dengan meningkatnya jumlah narapidana di Lapas, penting untuk memiliki manajemen publik yang kompeten dan efisien untuk mengatasi masalah ini. Reformasi sistem pemasyarakatan menjadi suatu prioritas yang harus dikejar untuk memastikan bahwa negara ini memenuhi standar internasional dan melindungi hak asasi manusia setiap narapidana dengan benar. Manajemen publik yang berkualitas adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini secara langsung dan menciptakan perubahan positif dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metodologi kualitatif, yaitu menjelaskan suatu fenomena secara mendetail dengan mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui referensi artikel ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipe Organisasi Pada Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan masuk dalam tipe organisasi sektor publik atau sektor pemerintahan yang bersifat *pure non-profit*. Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan yang dikelola oleh pemerintah. Tujuan utama lembaga pemasyarakatan adalah menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan, seperti penahanan, pemasyarakatan, dan rehabilitasi narapidana (Indriyatmoko, A., 2020). Sebagai lembaga sektor publik, Lembaga Pemasyarakatan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari organisasi sektor swasta (Al Faruq, M. K., & Wibowo, P., 2021). Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan pelayanan publik kepada narapidana dan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan juga beroperasi dengan sumber daya yang bersifat publik, seperti anggaran dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Lembaga Pemasyarakatan bekerja dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjalankan tugas-tugasnya (Pagau, R. M., dkk., 2018).

Dalam organisasi sektor publik, Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan yang berorientasi pada kepentingan umum, yaitu menjaga keamanan masyarakat, memulihkan narapidana, dan mempromosikan reintegrasi sosial. Tujuan ini mengarah pada pelayanan

publik yang berkualitas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, Lembaga Pemasyarakatan masuk ke dalam tipe organisasi sektor publik atau sektor pemerintahan, yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan untuk menjaga keamanan masyarakat dan memulihkan narapidana.

Pengimplementasian Manajemen Publik Pada Lapas Kelas I Malang

Manajemen publik pada Lapas Kelas I Malang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi berbagai kegiatan dan sumber daya yang terkait dengan pemasyarakatan narapidana. Tujuan utama manajemen publik dalam konteks Lapas Kelas I Malang adalah efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan (Denus, Y. R., & Yuliharsi, Y., 2022).

Berikut ini adalah beberapa aspek dan prinsip manajemen publik yang ada pada Lapas Kelas I Malang:

a. Perencanaan

Manajemen publik dalam Lapas Kelas I Malang melibatkan perencanaan strategis, perencanaan program, dan perencanaan kegiatan operasional. Hal ini mencakup penentuan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, pengembangan kebijakan dan program, serta alokasi sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam manajemen publik di Lapas Kelas I Malang melibatkan pembagian tugas, pembentukan struktur organisasi, dan pengaturan hubungan antar bagian atau unit kerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang baik, tanggung jawab yang jelas, dan efektivitas kerja dalam lembaga tersebut.

c. Pengarahan

Pengarahan dalam manajemen publik di Lapas Kelas I Malang melibatkan kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang baik, serta pengembangan dan motivasi staf. Penting bagi manajemen untuk mengarahkan dan menginspirasi staf dalam menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan etika yang tinggi.

d. Pengendalian

Pengendalian dalam manajemen publik di Lapas Kelas I Malang melibatkan pemantauan kinerja, pengawasan, serta pengendalian terhadap kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pemasyarakatan beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalamnya.

e. Evaluasi

Evaluasi dalam manajemen publik di Lapas Kelas I Malang akan melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan, efektivitas kebijakan dan program, serta kualitas pelayanan. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

Selain aspek-aspek tersebut, manajemen publik dalam lembaga pemasyarakatan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan yang berbasis data. Tujuan utama adalah memberikan pelayanan publik yang berkualitas, menjaga keamanan masyarakat, dan mendukung rehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana.

Hambatan Pada Pengimplementasian Manajemen Publik Pada Lapas Kelas I Malang

Dalam manajemen organisasi di Lapas Kelas I Malang, terdapat beberapa hambatan yang mungkin dihadapi (Fathya, V. N., 2018). Berikut adalah beberapa hambatan umum yang dapat menghambat efektivitas manajemen di Lapas Kelas I Malang:

a. *Overcrowding* (kepadatan):

Salah satu hambatan utama dalam manajemen lembaga pemasyarakatan adalah kepadatan atau *overcrowding*. Kepadatan yang tinggi dapat menyebabkan tekanan dan ketegangan di antara narapidana, serta mempersulit tugas pengawasan dan pemenuhan kebutuhan dasar narapidana.

b. Kurangnya sumber daya

Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran yang terbatas, fasilitas yang tidak memadai, atau kekurangan staf, dapat menjadi hambatan dalam menyelenggarakan pelayanan yang efektif di lembaga pemasyarakatan. Kurangnya sumber daya dapat mempengaruhi kualitas layanan, rehabilitasi, dan pemenuhan hak-hak narapidana.

c. Kurangnya tenaga profesional

Kualitas manajemen organisasi dalam lembaga pemasyarakatan sangat tergantung pada keahlian dan kompetensi staf. Kurangnya tenaga profesional yang terlatih dalam bidang penegakan hukum, rehabilitasi, dan pemasyarakatan dapat menghambat efektivitas manajemen dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

d. Masalah keamanan

Menjaga keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan tugas yang kompleks dan menantang. Adanya potensi konflik, perkelahian, atau kegiatan ilegal di dalam lembaga dapat menghambat kelancaran manajemen organisasi dan pelayanan yang berkualitas.

e. Ketegangan antara narapidana

Konflik atau ketegangan antara narapidana dapat menjadi hambatan dalam manajemen organisasi di lembaga pemasyarakatan. Ketegangan ini dapat mempengaruhi keamanan, suasana kerja, dan upaya rehabilitasi di dalam lembaga.

f. Ketidakpastian peraturan dan kebijakan

Perubahan peraturan atau kebijakan yang tidak konsisten atau tidak jelas dapat menyulitkan manajemen organisasi di lembaga pemasyarakatan. Ketidakpastian ini dapat menghambat perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan di lembaga.

g. Stigma masyarakat

Lembaga pemasyarakatan sering kali dihadapkan pada stigma negatif dari masyarakat. Stigma ini dapat menghambat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi serta reintegrasi narapidana. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk pengelolaan sumber daya yang efisien, peningkatan keahlian staf, perbaikan fasilitas, pengembangan kebijakan yang jelas, dan upaya untuk meredakan konflik antara narapidana. Selain itu, kolaborasi dengan pihak terkait, seperti lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat, juga penting dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan manajemen organisasi di lembaga pemasyarakatan.

Peran Penting Manajemen Publik dalam Lapas Kelas I Malang

Manajemen organisasi yang baik sangat penting dalam Lapas Kelas I Malang dengan beberapa alasan berikut:

a. Efisiensi operasional

Manajemen organisasi yang efektif membantu meningkatkan efisiensi operasional Lapas Kelas I Malang. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tepat, dan pengaturan yang baik, Lapas Kelas I Malang dapat beroperasi secara efisien, menghindari tumpang tindih tugas, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas.

b. Peningkatan pelayanan publik

Manajemen organisasi yang baik dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Lapas Kelas I Malang. Melalui perencanaan strategis yang matang,

pengorganisasian yang efektif, dan pengendalian yang baik, lembaga pemasyarakatan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada narapidana, termasuk dalam hal keamanan, perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

c. Pengelolaan risiko dan keamanan

Manajemen organisasi yang kuat membantu dalam pengelolaan risiko dan keamanan di Lapas Kelas I Malang. Dengan adanya kebijakan dan prosedur yang jelas, pengawasan yang ketat, dan manajemen yang responsif terhadap potensi masalah atau keadaan darurat, Lapas Kelas I Malang dapat menjaga keamanan dan ketertiban di dalamnya, melindungi narapidana, staf, dan masyarakat sekitar.

d. Pengembangan staf

Manajemen organisasi yang efektif juga berperan penting dalam pengembangan staf di Lapas Kelas I Malang. Melalui penilaian kinerja, pelatihan, pengembangan keterampilan, dan komunikasi yang baik, staf dapat diberdayakan untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan profesionalisme dan meningkatkan kompetensi mereka dalam penegakan hukum, rehabilitasi, dan pemasyarakatan.

e. Akuntabilitas dan transparansi

Manajemen organisasi yang baik mendorong akuntabilitas dan transparansi di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat, pelaporan yang jelas, dan mekanisme pengawasan yang efektif, lembaga pemasyarakatan dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum dan lembaga penegak hukum. Pentingnya manajemen organisasi dalam Lapas Kelas I Malang adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada narapidana, dan mendukung rehabilitasi serta reintegrasi sosial (Wiratama, R. A., 2021). Dengan manajemen organisasi yang baik, lembaga pemasyarakatan dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan memenuhi tuntutan pelayanan publik yang tinggi.

KESIMPULAN

Lapas Kelas I Malang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan yang dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan masuk dalam tipe organisasi sektor publik atau sektor pemerintahan yang bersifat *pure non-profit*. Manajemen publik yang baik dalam Lapas Kelas I Malang merupakan faktor kunci untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti menjaga keamanan, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan mendukung rehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana. Pengelolaan yang efektif dalam Lapas Kelas I Malang melibatkan perencanaan strategis, pengorganisasian yang baik, pengawasan yang ketat, dan evaluasi yang teratur terhadap kinerja lembaga. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pelayanan publik kepada narapidana.

Referensi

- Al Faruq, M. K., & Wibowo, P. (2021). Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dilembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibirong). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1048-1053.
- Denus, Y. R., & Yuliharsi, Y. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Pegawai Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Padang. *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(3), 15-28.
- Fathya, V. N. (2018). Tata Kelola Lembaga Pemasyarakatan: Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Manajemen Lembaga Pemasyarakatan. *Journal Of Correctional Issues*, 1(2), 104-120.

- Indriyatmoko, A. (2020). Penerapan Manajemen Kebakaran Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Ii A. *Higeia (Journal Of Public Health Research And Development)*, 4(Special 1), 262-273.
- Pagau, R. M., Kimbal, M., & Kumayas, N. (2018). Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Pradhana, F. A., & Wibowo, P. (2020). Analisis Pola Komunikasi Petugas Pada Manajemen Sekuriti Di Lembaga Pemasyarakatan. *Gema Keadilan*, 7(3), 139-154.
- Wiratama, R. A. (2021). Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 295-306.
- Times Indonesia.co.id. (2021). "Over Kapasitas, Ini Upaya Lapas Kelas I Malang Atasi Penyebaran Covid-19" Diakses oleh penulis pada tanggal 31 Mei 2023 melalui link berikut. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/322669/over-kapasitas-ini-upaya-lapas-kelas-i-malang-atasi-penyebaran-covid>